



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 410 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 5  
TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PADA SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab I huruf A dan Bab V huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 364 Tahun 2025;
- b. bahwa Sekretaris Daerah mengusulkan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui surat nomor 900/116/Perenc.Keu/XII/2025 Perihal Penyampaian Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah, maka terhadap Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keenam Belas Atas Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sekretariat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelola Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Sekretariat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati:

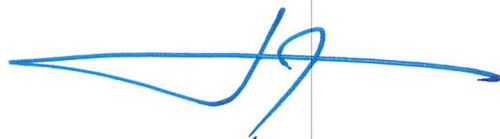
- a. Nomor 137 Tahun 2023;
- b. Nomor 179 Tahun 2023;
- c. Nomor 316 Tahun 2023;
- d. Nomor 429 Tahun 2023;
- e. Nomor 548 Tahun 2023;
- f. Nomor 18 Tahun 2024;
- g. Nomor 157 Tahun 2024;
- h. Nomor 345 Tahun 2024;
- i. Nomor 412 Tahun 2024;
- j. Nomor 446 Tahun 2024;
- k. Nomor 52 Tahun 2025;
- l. Nomor 161 Tahun 2025;
- m. Nomor 247 Tahun 2025;
- n. Nomor 316 Tahun 2025; dan
- o. Nomor 364 Tahun 2025.

pada Lampiran diubah yakni nomor urut 3 semula atas nama Yosman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Kesejahteraan Rakyat diganti dengan Zufren, M.P sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 410 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN  
2023 TENTANG PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PADA SEKRETARIAT DAERAH

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PADA SEKRETARIAT DAERAH

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
1.	DR, Mhd LUTFI AR, S.H, M.Si NIP. 19730313 199703 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang. Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM). Pengesahan SPJ.	
2.	EKKO ESPITO, SSTP, MA NIP. 19850807 200602 1 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Tata Pemerintahan	Kegiatan /SubKegiatan yang dikelola: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Administrasi Tata Pemerintahan. 7. Fasilitasi kerjasama Daerah

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
3.	ZUFREN, M.P NIP. 19710224 200003 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Bagian Kesejahteraan Rakyat.	Kegiatan /SubKegiatan yang dikelola: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 4. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang . Urusan Pemerintah Daerah 6. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 7. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Nafza di Luar Panti Sosial.
4.	DASWILZA, SP. MM NIP. 19700730 199701 1 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bagian Administrasi Pembangunan	Kegiatan /SubKegiatan yang dikelola: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.
5.	EMRIZAL, SP NIP. 19690607 199903 1 002 Pembina Tk. I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bagian Perekonomian	Kegiatan /SubKegiatan yang dikelola: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

			<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah</li> <li>5. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</li> <li>6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> </ul>
6.	RAHIM THAMRIN, S.ST.MT NIP. 19690508 199003 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan /SubKegiatan yang dikelola: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</li> <li>6. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</li> </ul>
7.	EMRA SUSPILIP, SH NIP. 19740409 199303 1 003 Pembina Tk. I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bagian Hukum	Kegiatan /SubKegiatan yang dikelola: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</li> <li>5. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum.</li> </ul>
8.	ELSI, SKM, M.Kes NIP. 19760827 200604 2 006 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Barang Bagian Perencanaan dan	Kegiatan /SubKegiatan yang dikelola: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> </ul>



		Keuangan.	<div>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</div> <div>3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Administrasi Keuangan Operasional KDH/WKDH.</div>
9.	KHASMAN ZAINI, SE,MPA NIP. 19800506 200501 1 007 Pembina Tk. I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	<div>Kegiatan /SubKegiatan yang dikelola:</div> <div>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</div> <div>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</div> <div>3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>6. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</div>
10.	MULKANI FITRY, SH, MM NIP. 19691218 199102 1 001 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bagian Umum	<div>Kegiatan/SubKegiatan yang dikelola:</div> <div>1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</div> <div>2. Administrasi Umum Perangkat Daerah</div> <div>3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div> <div>4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</div> <div>5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</div>

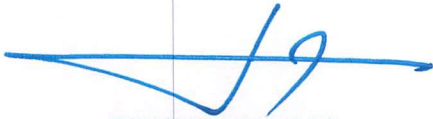
			6. Administrasi Keuangan Operasional KDH/WKDH 7. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
11.	LOLI ENNY, S.Pt, M.Si NIP. 19750608 200003 2 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bagian Organisasi	Kegiatan /SubKegiatan yang dikelola: 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penataan Organisasi. 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.	RIZONA GUIZA, S.IP NIP. 19880801 200701 2 002 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bagian Sumber Daya Alam	Kegiatan/Sub Kegiatan Bagian Sumber Daya Alam 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. 6. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam



NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
13.	ROSNANI, SE NIP. 19780601 200701 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	
14.	LUTFHI ARDIANSYAH, SST NIP. 19940402 202203 1 004 Penata Muda (III/a)	Pengurus Barang.	
15.	RINIL FITRIA, SE NIP. 19910420 202012 2 007 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Tata Pemerintahan
16.	RORI FIKEM SAPUTRA, S.Sos NIP. 19920523 202012 1 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Kesejahteraan Rakyat
17.	ULLICIA NEZY AZWITA, S.Ak NIP. 19851219 201001 2 014 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Administrasi Pembangunan
18.	RINI SEPRIYENTI, SE NIP. 19940914 202203 2 005 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Perekonomian
19.	NOVI ARIYANTI, SE NIP. 19811111 201101 2 007 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
20.	IRA HIDAYATI NIP. 19760119 200501 2 004 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Hukum
21.	TRININI HUSANA, A.Md NIP. 19840914 201001 2 037 Penata Muda Tk. I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Perencanaan dan Keuangan
22.	YULIANA PRIHARTINI NIP. 19850707 201001 2 003 Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
23.	ISMAIL NIP. 19770510 200701 1 006 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Umum

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT(GOL)	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KETERANGAN
24.	WELSHA FIVYLANDRA, S.Sos NIP. 19951113 202203 2 004 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Organisasi
25.	DONI ARNAS, SH NIP. 19800501 200801 1 004 Penata Tk. I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Bagian Sumber Daya Alam

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS